

Dari *Privacy* ke *Vulgar* :  
Perilaku Seks di Jawa Awal Abad ke-20\*

Oleh :  
Gayung Kasuma, S.S, M.Hum.\*\*

Abstrak

Tujuan penulisan makalah ini mencermati perubahan-perubahan perilaku seksual di Jawa awal abad ke-20 berkaitan dengan transisi sosial dan kultural masyarakat. Melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya berbagai kasus tersebut di lingkungan masyarakat Jawa. Memahami dinamika seks di Jawa serta dapat mengetahui hubungan antara masyarakat yang sedang berubah dengan fenomena seks yang terjadi. Untuk melacak permasalahan itu, publikasi dalam surat kabar yang terbit di Jawa awal abad ke-20 menjadi sumber utama, tulisan-tulisan dan terbitan buku periode yang sama dengan fokus penulisan.

Dunia seks di Jawa awal abad ke-20 menunjukkan, bahwa terjadi perubahan perilaku seks pada masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: dinamika penduduk, ekonomi, industrialisasi, dan apresiasi masyarakat melalui iklan obat kuat dalam surat kabar. Hasil penelitian memberikan gambaran pengaruh iklan obat kuat menstimulasi persepsi masyarakat terhadap seks, selain beberapa faktor tadi.

Secara riil, dunia seks di perkotaan Jawa berkembang melampaui batas-batas normatif, ditandai dengan munculnya prostitusi di Surabaya, Batavia, Jawa Tengah dan kota lainnya. Pada sisi lain, aborsi dan penyakit kelamin mewarnai kehidupan masyarakat Jawa masa itu, yang kesemuanya membuktikan seks semakin terbuka menjelang akhir kolonial Belanda di Jawa. Bentuk dan perilaku prostitusi menurut berbagai pendapat meningkat drastis pada abad ke-19 terutama setelah 1870 sampai menjelang awal abad ke-20 ketika ekonomi kolonial dibuka untuk modal swasta.

Selanjutnya, penerapan sistem pendidikan Barat yang telah merebak di perkotaan semakin mempercepat lajunya proses modernisasi yang merubah secara struktural lapisan sosial tertentu di masyarakat Jawa awal abad ke-20, tentu saja hal ini membawa implikasi secara tidak langsung pada gaya hidup, termasuk perubahan perilaku seksualitas. Kenyataannya rangkaian proses perubahan-perubahan yang berkembang telah mereduksi struktur masyarakat agraris, feodalisme, tradisional menuju masyarakat perkotaan yang bersifat modern.

Kata kunci: Ruang Privat, Ruang Publik, Perilaku Seksual.

\* Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII pada tanggal 14-17 November 2006 di Hotel Millenium, Jakarta.

\*\* Alumnus S1 dan S2 Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

## A. Dari *Privacy* ke *Vulgar* : Catatan Pengantar

“...Obat Tionghoa Posinwan. Ini obat terbikin oleh docter T. H. Lie Sim King, ada bergoena sekali pada orang lelaki dan prampoean; teroetama orang lelaki jang terlaloe banjak plesier, sampe tida dapet anak, toeroenan, badan djadi lemah kepala posing mata gelap serta toelang<sup>2</sup> berasa linoe kaki tangan tida koeat dan dingin, napsoe makan koerang, tidoer tida seneng, apa poela orang lelaki dan prampoean jang pernah sakit “Radjasinga” makan obat koerang bersih bolih makan ini obat, kesegeran nanti kembali...”<sup>1</sup>

Menyimak salah satu bunyi iklan di atas dan kemunculan beragam iklan sejenis periode ini, mengindikasikan bahwa perilaku seksual sudah semakin terbuka dalam kehidupan masyarakat. Makna seks semula bersifat privat menjadi perbincangan publik, karena adanya iklan yang setidaknya mengarah pada pergeseran makna dan fungsi seks itu sendiri. Makna dan fungsi seks bagi masyarakat Jawa dianggap suatu esensi yang sesungguhnya adalah sebagai sarana reproduksi untuk mendapatkan keturunan pada ruang domestik dan bersifat sakral. Namun selain tujuan esensial itu, seks sekaligus dinikmati dan diritualisasi sebagai sarana penikmatan hidup, menyimpan tujuan-tujuan yang bersifat hedonistik<sup>2</sup> serta dapat juga melahirkan gejala anormatif. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam iklan pada surat kabar awal abad ke-20 di Jawa muncul berbagai tawaran obat kuat, minuman, dan minyak yang berhubungan dengan kebutuhan seksualitas tersebut. Terdiri dari berbagai jenis dan merek, antara lain: obat Tionghoa Posinwan, obat kuat Kong Leng Poo,<sup>3</sup> minuman Bier Itam tjap ajam Djago(haan),<sup>4</sup> minuman arak merk Tjoen Tik Tong,<sup>5</sup> minyak Hindhie,<sup>6</sup> dan sebagainya. Barang-barang itu dapat diperoleh pada toko-toko atau rumah obat di Batavia, Semarang dan daerah sekitarnya, Demak, Kudus, Tegal,

---

<sup>1</sup> Iklan dalam surat kabar *Tjahaja-Timoer*, tanggal 12 October 1914, hlm. 3, kolom 3 & 4.

<sup>2</sup> Otto Sukatno Cr, *Seks Para Pangeran; Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Jawa* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), hlm. 3.

<sup>3</sup> Iklan dalam surat kabar *Harian Umum*, tanggal 16 Djuli 1951, hlm. 4, kolom I.

<sup>4</sup> Iklan dalam surat kabar *Pemberita Betawi*, tanggal 11 Agustus 1902, hlm. 3, kolom 2.

<sup>5</sup> Iklan dalam surat kabar *Tjahaja-Timoer*, tanggal 3 Juni 1914, hlm. 3, kolom 3.

<sup>6</sup> Iklan dalam surat kabar *Tjahaja-Timoer*, tanggal 28 December 1914, hlm. 4, kolom 2.

Pekalongan, Kutoarjo, Purbalingga, Banyumas, Malang, Blitar, serta Surabaya. Melalui iklan pada surat kabar, penawaran obat ini bertujuan memberikan sugesti dan dorongan bagi konsumen untuk membelinya. Apresiasi masyarakat terhadap iklan merupakan alat komunikasi yang khas sekaligus merefleksikan suatu perkembangan dan pergeseran makna seks bagi masyarakat kota dan pendukungnya. Tidak hanya sebatas iklan saja, melainkan gejala anormatif juga terjadi di masyarakat Jawa yang berupa pelacuran, pergundikan, *nyai*, pengguguran kandungan dan penyakit kelamin.

Ada beberapa indikator perubahan sosial masyarakat secara makro yang berkaitan dengan munculnya keterbukaan perilaku dan pergeseran makna seksualitas di Jawa pada akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20. Indikator yang dimaksud adalah kecenderungan perilaku seksual terkait dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami transisi dan perubahan sosial pada masa itu. *Pertama*, proses perubahan masyarakat di pulau Jawa ditandai dengan melemahnya nilai-nilai luhur bersifat lokal dan tradisional akibat adanya pengaruh modernisasi<sup>7</sup> yang di bawah oleh orang-orang Belanda. Modernisasi berupa gaya hidup<sup>8</sup> yang berpandangan Barat dan pengaruh penerapan sistem pendidikan Barat, interaksi masyarakat yang mengarah ke arah perilaku seks terbuka,<sup>9</sup> serta

---

<sup>7</sup> Para elit birokrasi di Jawa semakin merasakan pengaruh langsung dari pihak Belanda dan pengaruh segala modernisasi, maka oleh karena itu mereka memerlukan penghidupan kembali (*revival*) pelbagai nilai dan lambang tradisional, rupanya untuk mengatasi adanya semacam krisis identitas. Lihat Sartono Kartodirdjo, dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 57-79.

<sup>8</sup> Gaya hidup yang dimaksud adalah khusus mengenai perilaku seksualitas pada masa itu berbentuk pergundikan atau *nyai*. Suburnya budaya ini awalnya didukung oleh kebiasaan hidup membujuk para pejabat Belanda. Larangan membawa istri (kecuali pejabat tinggi) dan mendatangkan wanita Belanda ke Hindia Belanda mengakibatkan terjadi percampuran darah yang melahirkan anak-anak campuran dan menumbuhkan budaya dan gaya hidup Belanda-Pribumi, atau gaya Indis. Lihat Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), hlm. 8-9. Lihat juga Djoko Suryo, dkk., *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985).

<sup>9</sup> Lihat Terence H. Hull, dkk., *Pelacuran di Indonesia; Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan The Ford Foundation, 1997), hlm. 1-23. Berbagai peraturan dikeluarkan oleh pemerintah kolonial termasuk pencegahan dan rehabilitasi terhadap masalah seks bebas yang berupa prostitusi, korbannya, serta dampak yang ditimbulkannya. Lihat pada Seri

apresiasi masyarakat terhadap seks melalui iklan dalam surat kabar.<sup>10</sup> Kedua, perubahan yang semakin maju dibidang industrialisasi dan adanya pengembangan infrastruktur<sup>11</sup> berupa perbaikan jalan, fasilitas pelabuhan, pembangunan rel kereta api, dan sebagainya. Pengembangan infrastruktur ini tentu saja menyerap dan memberikan peluang bagi tenaga kerja atau buruh untuk mengenal sistem monetisasi berupa gaji atas pekerjaannya. Ketiga, tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa masih rendah<sup>12</sup> karena pengaruh sistem ekonomi kolonial sejak diterapkannya sistem Tanam Paksa dan berlanjut pada masa politik liberal pada sekitar tahun 1870-an.

Politik liberal dan masuknya kapitalisme setelah ini tidak memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan yang tidak dapat dinikmati oleh kalangan tertentu berdampak pada gejolak sosial. Akibat terdesak secara ekonomi, ada yang menjadi pencuri, pelacur,<sup>13</sup> serta banyak keluarga pribumi yang mempunyai anak wanita secara tidak langsung menjualnya kepada laki-laki Belanda untuk dijadikan gundik atau *nyai*. Keberadaan gundik atau *nyai* bagi orang

---

Penerbitan Naskah Sumber, *Pemberantasan Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial* (Jakarta: ANRI, 2001). Lihat pada Gavin W. Jones, dkk., Research School of Social Sciences No. 52, *Prostitution in Indonesia* (Canberra: The Australian National University, 1995). Lihat juga pada Branconier, A. De., "Het Prostitutie-vraagstuk in Nederlandsch-Indie" dalam *De Indische Gids*, 1933.

<sup>10</sup> Apresiasi muncul ketika membaca bunyi tulisan pada iklan yang turut andil memberikan stimulasi pada pemahaman wacana seks. Berbagai ragam iklan bermunculan mengenai obat kuat, minuman, buku petunjuk yang semuanya berhubungan dengan masalah seks. Banyak terdapat orang-orang China melalui toko-tokonya yang memberikan pelayanan dan penjualan obat-obat atau minuman tersebut, diantaranya dapat dilihat pada surat kabar *Tjahaja-Timoer*, tanggal 12 October 1914, 29 Juli 1914, 3 Juni 1914, 28 December 1914, juga surat kabar *Pemberita Betawi*, tanggal 11 Agustus 1902, 25 Agustus 1902, serta surat kabar Harian Umum, 16 Djuli 1951.

<sup>11</sup> J. Thomas Lindblad, "Tema-tema Kunci dalam Sejarah Ekonomi Modern Indonesia" dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 31.

<sup>12</sup> Sebagai akibat dari politik liberal Belanda, maka terasa sekali adanya kemunduran di dalam kesejahteraan penduduk di Jawa. Tulisan bangsa Belanda sendiri sekitar tahun 1900 membuktikan keadaan ini. Misalnya dalam *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestur* yang merupakan majalah hasil karya pangreh praja Hindia Belanda. Dalam majalah yang sama adanya perdebatan mengenai sebab musabab kemunduran kesejahteraan oleh C. J. Hasselman, kemudian terkenal sebagai orang yang menyusun laporan penelitian kesejahteraan (*welvaart-onderzoek*). Lihat pada Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa* (Jogjakarta: Karya, 1968), hlm. 16-17. Lihat juga Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, jilid 3* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 157.

<sup>13</sup> Denys Lombard, *loc. cit.*

Eropa lebih menguntungkan dibandingkan pergi ke tempat prostitusi.<sup>14</sup> Sisi lainnya yang mendorong tindakan pergundikan dan prostitusi tersebut disebabkan pada masa itu permintaan pelayanan seks<sup>15</sup> meningkat sejak kedatangan laki-laki Belanda yang tanpa istri atau belum menikah<sup>16</sup> ke pulau Jawa.

Bentuk dan perilaku prostitusi menurut berbagai pendapat meningkat drastis pada abad ke-19 terutama setelah 1870 sampai menjelang awal abad ke-20 ketika ekonomi kolonial dibuka untuk modal swasta. Ekonomi kolonial untuk modal swasta berupa pengembangan perkebunan, terutama di Jawa Barat yang penduduknya jarang, industri gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memerlukan banyak buruh lelaki dari daerah lain. Pengembangan sektor perkebunan diringi juga pembuatan jalan dan rel kereta api yang menghubungkan desa dan kota serta semua areal perkebunan yang dihuni oleh sejumlah besar buruh yang tidak tetap. Para buruh tersebut tidak membawa keluarga mereka, dan dengan uang yang dimiliki mencari wanita di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Beberapa tulisan menjelaskan hal ini, pada tahun 1906 Residen Batavia melaporkan bahwa pelacuran di Krawang meningkat ketika dibangun rel kereta api antara Krawang dan Padalarang.<sup>17</sup> Begitu juga dengan pembangunan jalan kereta api di wilayah Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta dan Surabaya tahun 1884 terjadi prostitusi. Lokalisasi ini tidak hanya melayani para pekerja buruh, tetapi juga tiap kota besar yang dilalui jalan kereta api, penumpang berdatangan ada yang tinggal di penginapan dan sekaligus juga menyediakan pelayanan seks.<sup>18</sup>

Ditengah berlangsungnya perilaku seks di atas, para seniman wanita dalam seni pertunjukkan tradisional di Jawa, khususnya para penari seperti *ledek*, *tandak*,

---

<sup>14</sup> Lihat "Culture and Women" di Batavia dalam Susan Abeyasekere, *Jakarta A History* (Singapore: Oxford University Press, 1987), hlm. 75-80.

<sup>15</sup> Lihat Terence H. Hull, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>16</sup> Djoko Soekiman, *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 123-124.

<sup>18</sup> Gavin W. Jones, dkk., *op. cit.*, hlm. 4.

*dombret, cokek, ronggeng*<sup>19</sup> dan *sinden* juga memberikan pelayanan seksual. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dianggap sebagai pelacur atau penjual seks. Pelayanan seks terutama dilakukan setelah pertunjukkan berakhir. Pertunjukkan seni rakyat tradisional demikian biasa pementasannya di atas panggung bagi perayaan tertentu seperti pasar malam, atau perayaan pernikahan pejabat lokal, dan hajatan lainnya.<sup>20</sup>

Kebutuhan hiburan dan kecenderungan perilaku seks tersebut merupakan esensi manusia dalam pemaknaan hidupnya, sebagai pelampiasan dari rutinitas, kejenuhan, konflik diri, dan gaya hidup. Menurut Michel Foucault, cerminan dari kenikmatan sebagai sesuatu yang mendestabilisasi dan mengancam tidak hanya bagi tatanan politik dan budaya tetapi juga semua jenis tatanan – baik tatanan suci/profan, tatanan tubuh dan bahkan tatanan teori. Dalam hal ini dikaitkan seks bagian dari kekuasaan yang dipahami sebagai hubungan kekuatan yang imanen.<sup>21</sup> Maka dari itu menurutnya, seks tercermin dengan relasi kuasa. Apabila pernyataan demikian dihubungkan pada masa awal abad ke-20 di Jawa, kekuasaan terwujud pada hal yang berupa penetrasi budaya Barat, kolonialisme, uang dan sistem monetisasi. Sebagian besar proses relasi kuasa apabila mengacu pada pendapat itu diawali dengan adanya kekuatan-kekuatan tersebut.

Kenyataan maraknya dunia seks di Jawa yang berupa pergundikan, *nyai*, pelacuran<sup>22</sup> dan sejenis membawa implikasi yang sangat buruk pada

---

<sup>19</sup> Mengenai ronggeng lihat juga Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, Vol I (London: Black, Parbury and Allen, 1817), hlm. 342-344. Dalam serat Centhini jilid V ada uraian yang menggambarkan seorang mantan ronggeng Ni Daya melakukan hubungan seksual dengan Ki Adipati. Lihat Marsono, dkk., *Centhini Tambangraras-Amongraga Jilid V*, Disadur dalam bahasa Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 161-162.

<sup>20</sup> Ninuk Kleden-Probonegoro, "Seks Dalam Seni Pertunjukkan Tradisional" dalam *Majalah Prisma* No.7 Tahun XX, Juli 1991, hlm. 51.

<sup>21</sup> Lihat Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan; Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 113-127.

<sup>22</sup> Dampak kesehatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat akibat adanya pelacuran menjadikan pemerintah kolonial membuat kebijakan berupa peraturan. Surat keputusan Gubernur Jendral tanggal 15 Juli 1852 No.1 mengenai peraturan untuk menanggulangi penyebaran prostitusi. Besluit Gubernur Jendral 21 Januari 1874 No. 14 peraturan mengenai pemberantasan prostitusi. besluit tanggal 18 November 1891 No. 2 peraturan mengenai pengawasan wanita tuna susila/prostitusi. Lihat pada penerbitan naskah sumber, *Pemberantasan Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial* (Jakarta: ANRI, 2001).

perkembangan kesehatan terutama bagi kalangan wanita penghibur. Munculnya penyakit kelamin dan kasus aborsi disebabkan oleh prostitusi dan sejenisnya, seperti yang digambarkan oleh Peter Boomgaard, khususnya mengenai permasalahan penduduk,<sup>23</sup> yang menimbulkan bermacam dampak masalah kesehatan. Adanya berbagai penyakit kelamin dan pengguguran kandungan atau aborsi merupakan fakta empiris<sup>24</sup> yang merebak seiring dengan perilaku seks yang semakin terbuka.

Kecenderungan perilaku seks bebas yang membawa dampak buruk ini, mendorong pemerintahan kolonial untuk membuat berbagai peraturan. Selain peraturan mengenai masalah prostitusi,<sup>25</sup> juga peraturan untuk mengurangi tindakan aborsi. Untuk tingkat desa pelayanan aborsi masih sangat tradisional, banyak dilakukan oleh dukun tanpa pengetahuan medis yang sempurna.<sup>26</sup>

## B. Perilaku Seks Masyarakat Jawa

Perilaku seks secara umum merupakan watak yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak, berbuat dan melakukan seksualitas. Seks merupakan kebutuhan dasar manusia, begitu juga halnya dengan masyarakat Jawa. Perilaku seks di kalangan pribumi adalah cerminan yang terungkap dalam stratifikasi dan pelapisan

---

<sup>23</sup> Lihat Peter Boomgaard, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic development in Java, 1795-1880* (Amsterdam: Free University Press, 1989), hlm. 159-164. Lihat juga dalam tulisan John Ingleson, "Prostitution in Colonial Java", ed., David P. Chandler dan M.C. Ricklefs, *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia, Essays in Honour of Professor J.D. Legge* (Victoria: Centre of Southeast Studies Monash University, 1986)., Mengenai hal ini juga sedikit digambarkan oleh J.A. Verdoorn, *Verloskundige Hulp Voor de Inheemsche Bevolking van Nederlandsch-Indie: Een Social-Mediste Studie*, Boekencentrum N.V. S-Gravenhage, 1941, hlm. 55-74.

<sup>24</sup> Jan Pieterszoon Coen menetapkan agar pergundikan harus diberantas. Pergundikan berakibat keguguran kandungan dan pembunuhan bayi. Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh; Pemukiman Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm 317.

<sup>25</sup> Prostitusi menimbulkan bermacam masalah dan dianggap merajalela, maka pemerintah menganggap perlu dikeluarkannya peraturan untuk menanggulangnya. Peraturan ini terdiri dari 23 pasal, sesuai dengan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Januari 1874 No. 14, dalam penerbitan naskah sumber, *Pemberantasan Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial* (Jakarta: ANRI, 2001), hlm. 4-13.

<sup>26</sup> J. P. Kleiweg De Zwaan, *Abortus Provocatus in Den Indeschen Archipel*, dalam *Voor Ned-Indie en Het Buitenland Afzonderlijke Numbers*, Jargaang Nummer 02, hlm.127-128.

masyarakat yang tentu saja hal ini sudah berlangsung jauh sebelum abad ke-20. Hanya yang membedakan adalah perilaku ini semakin terbuka di tengah masyarakat yang sedang mengalami transisi secara demografis akibat dari ekonomi liberal, industrialisasi dan modernisasi. Transisi masyarakat juga karena populasi, tingkat kelahiran<sup>27</sup> dan migrasi akhir abad ke-19 dan menjelang abad ke-20 di Jawa. Sejauhmana transisi masyarakat dan perubahan sosial itu mempengaruhi pola dan perilaku seks masyarakat, dapat dilihat pada beberapa kelompok masyarakat berikut. Pembagian kelompok ini merupakan contoh kecil saja, karena pelapisan masyarakat sangat luas sehingga perlu adanya pengkategorian demikian. Maksudnya untuk mengidentifikasi kecenderungan kehidupan seksual yang berlaku pada golongan tertentu.

#### 1. Priyayi atau Elite Birokrasi

Untuk melihat kehidupan perilaku seksual priyayi dan elite birokrasi tidak mudah didapatkan apalagi masalah ini menjadi bagian sakral dan pribadi bagi sebagian orang. Untuk mengungkap bagaimana perilaku itu terutama di Jawa hanya sebagian saja dapat ditemukan, terutama kisah-kisah dibalik kehidupan pembesar kraton. Raja-raja mataram dan kerajaan-kerajaan penerusnya menganut sistem perkawinan poligami. Sebagian dari mereka memiliki istri utama, yang disebut permaisuri, sebagian lainnya mempunyai lebih dari seorang permaisuri. Selain permaisuri, raja mempunyai banyak selir, yang disebut pula dengan istilah *garwa ampeyan*, *garwa pangrembe*, *garwa paminggir* atau *priyantun dalem*.<sup>28</sup> Sebagai contoh, Paku Buwana VII hanya memiliki seorang *garwa ampeyan*, R. Retnadiluwih; Paku Buwana VIII tidak mempunyai selir, dan Paku Buwana IX mempunyai 51 orang selir, 5 orang diantaranya memakai sebutan B.R. Ayu, karena mereka masih cucu raja.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Norman G. Owen (ed.), *Death and Disease in Southeast Asia* (New York; Oxford University Press Singapore, 1987), hlm. 84.

<sup>28</sup> Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939* (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000), hlm. 220.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 229.



Umumnya kehidupan priyayi atau elit birokrasi lebih banyak dalam dunia kraton. Bukan hal yang asing lagi menjelang abad ke-20 masih terdapat beberapa pembesar kraton memiliki istri dan selir lebih dari satu. Keberadaan para istri raja adalah karena perkawinan politik atau selir karena semata strategi perkawinan pegawai bawahan. Menurut Denys Lombard pegawai bawahan berusaha untuk meniru pola yang sama di dalam ruang di bawah kuasa mereka, di pinggiran kraton. Mereka berusaha mengangkat status sosial anak mereka dengan menerapkan strategi perkawinan yang tepat, yaitu dengan mengawinkan putranya dengan wanita yang lebih tinggi derajatnya, atau dengan mengawinkan puteri-puteri mereka dengan bangsawan besar. Walaupun pegawai bawahan tidak mengambil bagian dalam strategi persekutuan yang berlangsung di kraton. Struktur hierarkinya terbuka di bawah dan tidak ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Terjadi semacam kesinambungan hierarkis yang berfungsi memperkuat kohesi sosial.<sup>30</sup> Sebagaimana kasus pada strategi budaya keraton-keraton pada periode “Jawa Tengahan” yaitu kira-kira Surakarta Awal, pihak raja (elite) berusaha mensosialisasikan seluruh perangkat nilai dan spritualnya ke hadapan publik yang sejauh mungkin dapat diacunya dalam strategi politik kekuasaan dan kebudayaannya. Dari tangan para elite (bangsawan atau pangeran) inilah lahir karya-karya sastra dan spritualitas yang menjadi pedoman keteladanan dan acuan rakyat yang diacunya. Termasuk di dalamnya adalah bidang-bidang domestik (seksual).<sup>31</sup> Munculnya serat Centhini<sup>32</sup> secara hipotesis oleh Denys Lombard

---

<sup>30</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 74.

<sup>31</sup> Otto Sukatno Cr, *op. cit.*, hlm. 35-36.

<sup>32</sup> Serat Centhini merupakan kisah-kisah petualangan seksual yang moderat yang ditulis atas prakarsa Sunan Paku Buwana V di Surakarta. Pekerjaan tersebut mulai dikerjakan pada hari Sabtu Pahing, tanggal 26 Muharam tahun Je, Mangsa VII, angka tahun Jawa 1742 dengan sengkalan: Paksa Suci Sabda Aji (=bulan Januari 1814 M). Lihat Purwadi, *op. cit.*, hlm. 33. Adapun nama “Centini” yang menjadi nama keseluruhan *Serat* itu mengacu kepada tokoh wanita yang kurang penting, seorang pelayan biasa yang hanya muncul sekali-sekali. Dalam hal ini pun tidaklah mudah menelusuri alasan pemilihan nama tersebut. Bagian pertama Serat Centhini kadang kala dinamakan Serat Cebolang, yang mengacu kepada tokoh Mas Cabolang, juga pemegang peran yang tidak penting, meskipun kalau dibandingkan masih lebih penting dari pelayan yang bernama Centini. Lihat Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 149 & 210.

dianggap sebagai suatu usaha dari kekuasaan pusat untuk merangkul tradisi pinggiran dan memasukkannya ke dalam “tradisi Jawa yang besar” justru pada saat tekanan Barat mulai meningkat.<sup>33</sup> Pada realitas yang terjadi saat ini budaya itu menjadi bagian “tradisi besar Jawa” dan mengakar dalam perilaku hidup bangsawan atau pejabat kraton. Selanjutnya ditiru oleh pegawai bawahan atau rakyat biasa khususnya dalam bidang seks. Misalnya yang diuraikan dalam Centhini II (Pupuh Asmaradana, 107:3 sampai 36).<sup>34</sup> Dalam bab ini diuraikan dengan gamblang “bab ulah-asmara” yang berhubungan dengan letak-letak genital yang sensitif dalam kaitan permainan seks yang dikaitkan dengan sistem kalender, “*pambukaning rahsaning perempuan*” (cara membuka atau mempercepat orgasme bagi perempuan), serta “*panyegah wedaling rahsa*” (mencegah atau memperlambat agar sperma tidak cepat keluar), dan lain-lain. Dalam Centhini IV (Pupuk Balabak, 275:37-39)<sup>35</sup> diuraikan dengan gamblang dan terbuka, bagaimana *pratingkahing cumbana* (gaya persetubuhan atau *sex acts*) serta sifat-sifat perempuan dan bagaimana cara menggugah nafsu asmaranya. Ajaran mengenai seksualitas ini jelas dibaca dan dipraktekkan bagi generasi ke generasi sampai memasuki abad ke-20. Oleh karena itu, perilaku seks bagi kalangan elite sangat kental dengan nilai luhur budaya, simbolisme dan mistifikasi Jawa. Misalnya, candi Sukuh selain sebagai tempat *pengruwatan sukerta*, juga merupakan tempat pendidikan seks dan spritual. Selain itu orang Jawa memiliki simbol *lingga yoni*. *Lingga* melambangkan *falus* atau penis, alat kelamin laki-laki. Sedangkan *yoni* melambangkan vagina, alat kelamin perempuan. Simbol ini sudah lama dipakai oleh masyarakat sebagai penghalus atau *pasemon* dari hal yang dianggap jorok. Simbol lain seperti *lesung alu*, *munthu cobek* dan sebagainya juga bermakna sejenis. Pelukisan seksual dalam khasanah filsafat Jawa dikenal

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.149.

<sup>34</sup> Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunegara III, *Centhini II* (Yogyakarta: Yayasan Centhini, Yogyakarta, 1988), hlm. 67-70. Dikutip dari Otto Sukatno Cr, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>35</sup> *loc. cit.*

dengan *isbat curiga manjing warangka* yang arti lugasnya adalah keris masuk ke dalam sarungnya.<sup>36</sup>

## 2. Tenaga Kerja atau Buruh

Perilaku seks terbuka menjelang abad ke-20 bagi kalangan tenaga kerja atau buruh banyak terjadi di pabrik dan perkebunan. Perilaku seks terbuka yang terjadi adalah mengarah pada bentuk pelacuran atau seks bebas. Tenaga kerja laki-laki berpindah tempat dari asalnya di desa-desa dengan meninggalkan keluarga istri dan anak, sementara sulitnya wanita Jawa mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan ada sebagian wanita yang menjadi pelacur karena terdesak kebutuhan nafkah hidup. Sementara bagi laki-laki yang jauh dari istrinya mereka mencari kepuasan biologis ke tempat-tempat pelacuran.<sup>37</sup> Menurut Denys Lombard terbentuknya kaum sub-proletar perkotaan berasal dari tahap dan proses perubahan golongan marjinal daerah pingiran yang menuju ke perkotaan. Dalam paruh pertama abad ke-20 jumlah penduduk bertambah banyak, sejajar dengan perkembangan kota-kota, terutama kota Surabaya. Industri dan perniagaan kota tersebut dianggap paling maju. Di lokasi dekat pasar-pasar dan stasiun kereta api, terbentuk golongan sub-proletar permanen yang pertama. Golongan miskin kota ini, diantara mereka terdesak oleh keadaan ada yang menjadi pencuri dan pelacur<sup>38</sup> bagi wanita.

*The Declining welfare commission* yang didirikan pemerintah kolonial menerbitkan beberapa jilid buku setelah 1905 yang membuat studi singkat mengenai tingkat prostitusi di Jawa. Survey diadakan di seluruh distrik administratif antara pertengahan 1904 sampai akhir 1906 dan diketahui prostitusi meningkat di

---

<sup>36</sup> Hariwijaya, *Seks Jawa Klasik* (Yogyakarta: Niagara, 2004), hlm. 37.

<sup>37</sup> Pengembangan pabrik gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pengembangan perkebunan di Jawa Barat yang penduduknya jarang merupakan wilayah yang menyebabkan komposisi buruh lebih besar. Tahun 1870-an sampai awal abad ke-20 dilaporkan prostitusi dan penyakit sifilis meningkat drastis di Jawa. Lebih lengkap lihat John Ingleson, "Prostitution in Colonial Java" dalam David P.Chandler & M.C. Riklefs (ed.), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia, Essay in Honour of Professor J.D. Legge* (Australia: Centre of Southeast Studies Monash University, 1986), hlm. 123-126.

<sup>38</sup> Lihat Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 157.

41 distrik. Pejabat setempat menjelaskan alasan peningkatan ini disebabkan; banyaknya jumlah pekerja pabrik dan perkebunan yang berasal dari luar daerah; banyak laki-laki dan wanita yang bekerja bersama (berdekatan), dan kondisi ekonomi yang sulit yang memaksa wanita mencari pendapatan dari berbagai sumber.<sup>39</sup> Menjadi pelacur merupakan pilihan hidup sebagai alternatif pemuasan seks individu dan mendapatkan uang dengan mudah. Bagi mereka yang terlanjur hamil tidak ingin punya anak dengan cara demikian terpaksa melakukan aborsi.<sup>40</sup>

### 3. Pekerja Seni

Perilaku seks bagi pekerja seni panggung hiburan merupakan bagian tersendiri dalam kehidupan masyarakat di Jawa. Penciptaan seni pertunjukkan memunculkan berbagai *image* ke arah yang berbau porno-aksi. Pertunjukkan seni rakyat tradisional demikian biasa pementasannya di atas panggung bagi perayaan tertentu seperti pasar malam sekaten, atau perayaan pernikahan pejabat lokal, dan hajatan lainnya.

Membicarakan citra perilaku seks yang ada pada seni pertunjukkan tradisional dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pandangan masyarakat terhadap perilaku seks seniman termaksud dan pandangan diri si seniman terhadap perilaku seksnya. Dalam hal ini pandangan terhadap perilaku seks seniman tidak dapat dilepaskan dengan pandangan terhadap seni pertunjukannya. Tidak ada seni pertunjukkan yang oleh masyarakat, dianggap terhormat mempunyai seniman dengan perilaku yang tidak terhormat. Posisi terhormat dan tidak terhormatnya seniman akan dilihat terutama dari perilaku seksnya. Mereka mempunyai citra perilaku seks yang berbeda dengan masyarakat umumnya. Seperti telah banyak diketahui oleh umum, perilaku seks pada seni pertunjukkan tradisional banyak disangkutkutan dengan tokoh-tokoh wanita pemain.

---

<sup>39</sup> John Ingleson, "Prostitution in Colonial Java" dalam David P.Chandler & M.C. Riklefs (ed.), *op.cit.*, hlm.129-130.

<sup>40</sup> Lihat J.A. Verdoorn, *Verloskundige Hulp Voor de Inheemsche Bevolking van Nederlandsch-Indie; Een Sociaal-Medische Studie* (Bookencentrum N.V 's-Gravenhage, 1941), hlm. 61-62.

Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dianggap sebagai pelacur atau penjual seks.

Di Jawa Timur yang terkenal dengan seni pertunjukkan ludruk, ada penari dengan dandanan dan penampilan wanita yang disebut *ronggeng* atau *taledek*. Sedangkan Pigeaud<sup>41</sup> mencantumkan laporan F.J. Rotenbuhler pada tanggal 31 Desember 1812 tentang pajak yang harus dibayar oleh para *tandak* yaitu penari-penari dari kelas bawah yang ditanggap, di Surabaya. Di Yogyakarta dan Jawa Tengah orang juga mengenal *tayub* dengan tokoh penari wanita yang disebut *joged* atau *taledek*. Menurut deskripsi Pigeaud, ia melihat penari *taledek* ini di suatu *tayuban* pada tahun 1929 ketika ada sekaten di Sala. Di daerah kebudayaan Betawi khususnya yang kuat dipengaruhi Cina, orang mengenal *cokek*. Di daerah ini dan Jawa Barat dikenal pula *ronggeng* yang mempunyai beberapa arti. Selain itu, di sekitar Krawang ada suatu seni pertunjukkan *dombret* atau ada pula yang menyebutnya *dongbret*.

Kalau kita simak deskripsi tersebut, maka tampak bahwa seni pertunjukkan tradisional dengan tokoh wanita yang mempunyai peranan seks, ada di seluruh pulau Jawa. Mereka dikenal dengan berbagai sebutan, yaitu *gandrung*, *ronggeng*, *taledek*, *ledek*, *kledek*, *tandak*, *joged*, *cokek* dan *sinden*, yang muncul dalam berbagai peristiwa pesta yang menggunakan pertunjukkan.

*Tayuban* yang dikenal sejak dari Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Yogyakarta, dalam kebudayaan Betawi tarian serupa dikenal dengan istilah *cokek*. Peristiwa ini muncul pada pesta-pesta yang berhubungan dengan ritus kehidupan terutama perkawinan, tetapi kadangkala juga muncul pada pesta khitanan atau pesta ulang tahun. Baik *tayub* maupun *cokek* sebenarnya adalah suatu bentuk tarian saja, namun pesta yang sering diringi pula dengan minuman keras membawa pengaruh tertentu. *Cokek* yang dalam hal ini juga disebut *ronggeng* menari dalam tarian yang disebut *ngibing* dengan iringan *gambang kromong*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lebih lengkap ulasannya mengenai ini lihat Th. Pigeaud, *Javanese Volkvertoningen* (Batavia: Volkslehtuur, 1938), hlm. 139.

<sup>42</sup> Ninuk Kleden-Probonegoro, "Seks dalam Seni Pertunjukkan Tradisional" dalam *Prisma* No. 7 Tahun XX, Juli 1991, hlm. 40-41.

Prosesi yang mengarah ke ritual seks adalah ketika laki-laki menari dalam posisi sangat dekat dengan *ledeknya* berusaha untuk menciumnya. Saat-saat memasuki ritual ini biasanya tengah malam sampai menjelang pagi. Ketika banyak orang sudah mabuk, seorang laki-laki dapat menari enam kali atau lebih. Sudah menjadi aturan yang tak tertulis bahwa setelah menari, tamu laki-laki itu membayar; di daerah tertentu cara pembayaran dilakukan dengan menyelipkan uang itu di balik kutang para penari. Di tempat lain, yang menerima uang adalah *pramugari* yang kemudian meletakkannya dalam wadah yang telah disediakan di atas meja. Terjadi transaksi pembayaran dengan cara di atas, maka *ledek, taledek, kledek, tandak, joget, ronggeng, cokek* dan *sinden* sering dokonotasikan dengan pelacur.<sup>43</sup> Bahkan menurut beberapa sumber ada yang setelah menari melakukan hubungan seksual dengan seorang penonton laki-laki yang tertarik dan mampu membayarnya. Citra demikian yang membuat mereka menjadi kelompok yang dikategorikan pelacur, khusus dalam dunia seni pertunjukkan tradisional di Jawa.

### C. Bentuk-Bentuk dan Perilaku Seks Vulgar

Bentuk-bentuk dan perilaku seks vulgar berupa prostitusi yang berkembang pesat di masyarakat dapat dikategorikan terselubung dan legal (resmi). Prostitusi terselubung yang terjadi adalah pergundikan, *nyai*, selir dan sejenisnya. Sementara lokalisasi yang resmi, adanya rumah bordil dan tempat-tempat pelacuran. Sebagaimana prakteknya, keduanya sama-sama memiliki unsur keterkaitan dengan watak moral dan kepribadian pelaku. Budaya asing yang datang juga memberikan kontribusi besar terhadap perubahan itu dengan gaya hidup, pergaulan dan cara berpakaian yang semakin terbuka bagi wanita pribumi.

Pada tanggal 15 Juli 1852, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks, tetapi dengan serangkaian aturan untuk menghindari tindak kejahatan yang timbul akibat dari aktivitas prostitusi ini. Pada mulanya peraturan ini diperuntukkan pada 3 kota besar di Jawa; Batavia, Semarang dan Soerabaya. Selanjutnya menyebar ke seluruh daerah/kepulauan,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

termasuk Padang dan Ambon. Peraturan 15 Juli 1852 berbunyi antara lain; bahwa wanita publik<sup>44</sup>, diawasi secara langsung dan ketat oleh polisi. Semua wanita publik yang terdaftar diwajibkan memiliki kartu kesehatan dan secara rutin menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit syphilis atau penyakit kelamin lainnya. Apabila ditemukan seorang wanita berpenyakit kelamin, harus segera menghentikan prakteknya dan harus diasingkan dalam suatu lembaga yang didirikan khusus untuk menangani perempuan yang terkena penyakit tersebut. Untuk memudahkan polisi dalam menangani industri seks, para wanita publik dianjurkan sedapat mungkin melakukan aktivitasnya di rumah-rumah bordil. Peraturan tersebut ternyata membingungkan para pelaku di industri seks, termasuk juga pemerintah sendiri. Dampak dari itu, tahun 1858 disusun penjelasan berkaitan dengan peraturan tersebut dengan maksud untuk menegaskan bahwa peraturan tanggal 15 Juli 1852 tidak diartikan sebagai pengakuan bordil sebagai lembaga komersil. Sebaliknya rumah-rumah bordil diidentifikasi sebagai tempat konsultasi medis untuk membatasi dampak negatif adanya pelacuran. Meskipun perbedaan “pengakuan” dan “persetujuan” sangat jelas bagi aparat pemerintah, tapi tidak cukup jelas bagi masyarakat umum dan wanita publik itu sendiri. Tanggungjawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sesuai dengan *Memory van Toelichting* tanggal 1 Januari 1873. Hal ini membuktikan bahwa peraturan pemerintah tahun 1852 secara efektif dicabut digantikan dengan peraturan penguasa setempat. Pengalihan tanggungjawab pengawasan rumah bordil tersebut menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan pemukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Aktivitas pelacuran terus meningkat secara drastis meskipun telah dikeluarkan banyak peraturan. Sejak diadakannya pembenahan hukum Agraria pada tahun 1870, membuka perekonomian negara

---

<sup>44</sup> Pada waktu itu istilah Wanita Tuna Susila adalah “wanita publik”. Wanita ini menjual atau menyewakan tubuhnya untuk kenikmatan orang lain dengan mengharapkan imbalan uang atau barang berharga lainnya.

jajahan terbuka bagi para penanam modal swasta.<sup>45</sup> Juga masyarakat telah mengenal sistem monetisasi, alat pembayaran dan transaksi berupa uang resmi dari pemerintah. Hal ini juga memudahkan para buruh perkebunan dan pekerja lainnya dapat menggunakan gaji atau upah mereka untuk kebutuhan hidup dan hiburan serta bagi yang masih bujangan pergi ke tempat-tempat pelacuran.

Keberadaan wanita penghibur seiring dengan pembangunan tempat-tempat penginapan, konstruksi jalan kereta api dan fasilitas lainnya. Perkembangan selanjutnya tidaklah mengherankan bahwa banyak kompleks pelacuran tumbuh di sekitar stasiun kereta api hampir di setiap kota. Contohnya di Bandung, kompleks pelacuran berkembang di beberapa lokasi di sekitar stasiun kereta api termasuk Kebon Jeruk, Kebon Tangkil, Sukamanah dan Saritem. Di Yogyakarta kompleks pelacuran muncul di daerah Pasar Kembang, Mbalokan, dan Sosrowijayan. Di Surabaya, kawasan lampu merah pertama adalah dekat stasiun Semut dan dekat pelabuhan di daerah Kremil, Tandes dan Bangunsari. Beberapa lokasi kompleks pelacuran tersebut sampai sekarang masih beroperasi, walaupun keberadaan tempat-tempat penginapan atau hotel-hotel di sekitar stasiun kereta api juga telah berubah.<sup>46</sup> Laporan dari John Ingleson tidak jauh beda dengan Terence H. Hull maupun Peter Boomgaard yang menggambarkan bagaimana prostitusi di Surabaya sangat kompleks dan populer. Sebagai kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta, dan sebagai jalur perdagangan utama di Indonesia Timur, kota Surabaya pada saat penjajahan Belanda berkembang sebagai kota pelabuhan terkemuka, pangkalan angkatan laut, pangkalan para tentara garnisun dan sebagai daerah tujuan akhir lintasan kereta api. Akibat dari perkembangan kota ini, pada abad ke-19 Surabaya menjadi terkenal karena aktivitas pelacurannya. Kondisi tersebut juga dinyatakan Ingleson dalam tulisannya. Banyak kapal barang dan kapal angkatan laut yang memasuki pelabuhan dengan segera dikelilingi perahu-perahu kecil berisi para pelacur setempat yang mencari pelanggan baru. Hingga pertengahan abad ke-19 para pelacur diperbolehkan naik ke kapal milik angkatan

---

<sup>45</sup> Djoko Utomo, dkk., *op. cit.*, hlm. xix-xxi.

<sup>46</sup> Terence H. Hull, *op. cit.*, hlm. 7.



laut dengan pertimbangan bahwa lebih baik mengawasi awak kapal yang mempunyai aktivitas pribadi di dalam kapal daripada membiarkan mereka berkeliaran di dalam kota untuk mencari para wanita penghibur. Menurut catatan resmi sejarah kota Surabaya dinyatakan bahwa pada tahun 1864 terdapat 228 wanita yang mempunyai profesi sebagai pelacur di bawah pengawasan 18 pemilik rumah bordil. Angka ini meragukan karena dianggap terlalu kecil, dan mungkin hanya menunjukkan banyaknya pekerja seks yang terdaftar secara resmi.<sup>47</sup> Padahal masih banyak yang melakukan prostitusi di jalanan yang berasal dari lokasi setempat.

Pada tahun 1939 ahli penyakit kulit dari Batavia R.D.G. Pl. Simon menerbitkan serangkaian laporan mengenai prostitusi di Hindia Belanda, kebanyakan pengamatannya di kota Surabaya. Laporan tersebut memberi pemahaman yang tajam tentang sisi kehidupan dalam pemerintahan kolonial yang pada umumnya belum diketahui. Simon menganalisa 8 kelas prostitusi yang berbeda yang dia temukan di Surabaya, antara lainnya; pelacuran yang ada di cafe-cafe kecil dekat pelabuhan dan di kota pelabuhan lama; pelacur-pelacur jalanan yang berasal dari kampung setempat; rumah-rumah pelacuran di pusat kota dimiliki oleh orang China dan Jepang; lokalisasi yang di kampung-kampung di pinggiran kota; pelayanan khusus oleh pembantu rumah tangga wanita setempat; pelayanan tersembunyi wanita Belanda yang terkekang di rumah terhadap laki-laki mudah yang belum beristri; prostitusi wanita Eropa di rumah-rumah bordil yang terorganisir di daerah tertentu; prostitusi homoseksual dan pejantanan. Sementara tarif harga bagi wanita penghibur di atas, berbeda satu sama lainnya; untuk pelacur pribumi yang di perkampungan dan di jalanan lebih kurang 1 guilder. Untuk rumah

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 8. Selengkapnya lihat juga John Ingleson, "Prostitution in Colonial Java" dalam David P. Chandler dan M.C. Riklefs (ed.), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia; Essay in Honour of Professor J.D. Legge* (Australia: Centre of Southeast Studies Monash University, 1986). Lihat juga pada Peter Boomgaard, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880* (Amsterdam: Free University Press, 1989).

bordil besar yang dijalankan orang China, wanitanya berasal dari keturunan China tarifnya 2 guilders 50 cents. Lebih tinggi jika dibandingkan pelacur pribumi.<sup>48</sup>

Beberapa kelas di atas dapat juga ditemui di perkotaan besar lainnya. Komposisi masyarakat secara sosial di kota-kota besar maupun kota-kota kecil di Jawa sangat membuka peluang perilaku seksual tersebut. Keberadaan prostitusi di Hindia Belanda, terutama munculnya pusat perkotaan yang banyak penduduknya, serta perkembangan budaya yang disertai usaha-usaha industri. Prostitusi paling banyak dilakukan oleh pribumi yang didahului oleh perilaku seks tanpa ikatan perkawinan. Akhir abad ke-19 sampai memasuki abad ke-20 dalam laporan dari komisi rakyat, memberitakan di Batavia di temui 300 anak wanita yang masih muda dan para istri melakukan prostitusi di pelabuhan Tanjung Priok, bahkan jumlah itu mencapai 400. Mereka kebanyakan berasal dari Batavia sekitarnya, dari Sunda, Jawa Tengah sekitarnya serta dari nusantara. Dalam laporan itu lebih jauh digambarkan, bahwa banyak dari mereka terutama yang masih muda memiliki penghasilan yang baik dan banyak uang dari pekerjaan ini; mereka membeli pakaian; mereka ingin terus-menerus melakukan hal demikian. Kedatangan mereka awalnya mendengar dari teman-teman bahwa mencari uang lebih mudah di Batavia. Mereka tinggal bersama 2 atau 3 orang, dan ada juga yang sendiri. Mereka melakukan aktivitas prostitusi sepanjang malam.<sup>49</sup>

Dari laporan ini semakin jelas bahwa kaum migran atau pendatang merupakan bagian terpenting yang melakukan tindakan prostitusi. Menjelang awal abad ke-20 masyarakat sudah semakin terbuka mengenal beragam budaya dan berbagai perubahan di berbagai sektor. Industri, fasilitas dan perniagaan kota dianggap yang paling maju. Daya tarik ini memberikan kekuatan bagi pendatang baru menuju ke kota. Dalam tulisan Ingleson menggambarkan kenyataan 40 % dari angkatan kerja selama masa penjajahan merupakan pendatang yang

---

<sup>48</sup> John Ingleson, "Prostitution in Colonial Java" dalam David P. Chandler dan M.C. Riklefs (ed.), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia; Essay in Honour of Professor J.D. Legge* (Australia: Centre of Southeast Studies Monash University, 1986), hlm. 125-126.

<sup>49</sup> A. De Braconier, "Het Prostitutie-vraagstuk in Nederlandsch-Indie" dalam *De Indische Gids* (Amsterdam: N.V. Drukkerij en Uitgeverij, 1933), hlm. 913.

sebagian besar mereka adalah laki-laki tinggal di perkotaan. Keberadaan para wanita penghibur tadi juga dibutuhkan oleh kelompok ini.<sup>50</sup> Di antara pendatang itu seperti di Batavia dalam laporan administratif ada juga para gelandangan dan perantau yang mengancam ketertiban sosial. Mereka berkeliaran di sudut kota-kota dekat keramaian dan jalur transportasi. Sama halnya di Surabaya, pendatang yang gelandangan tinggal di dekat-dekat pasar dan stasiun kereta api. Menurut istilah Denys Lombard menamakan komunitas ini dengan golongan sub-proletar. Golongan ini dalam istilah Jawa disebut; *wong ngemis* atau *wong kere*. Akibat terdesak oleh keadaan dan masalah ekonomi, ada di antara mereka yang menjadi pencuri atau pelacur.<sup>51</sup> Secara statistik tidak ada informasi prosentase kelompok ini, namun demikian keberadaan mereka juga merupakan bagian dari fakta sejarah yang menunjukkan adanya pelacuran dari para gelandangan.

Masalah prostitusi dianggap semakin marajalela dan berkembang pesat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mananggulangi masalah ini. Peraturan tersebut terdiri dari 23 pasal semuanya berlaku sejak 1 Juli 1874. Semua yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 11 alenia 2, pasal 12 alinea terakhir, pasal 13 alinea terakhir, dan pasal 20 allenia terakhir akan dikenakan denda f. 1 – f. 10. Sedangkan untuk pasal 17, 18, 19 didenda f.1 – f. 25.<sup>52</sup> Peraturan demikian memberikan pengawasan yang optimal agar tidak terjadi berbagai kemungkinan yang menimbulkan keresahan sosial dan ketertiban masyarakat

#### D. Perilaku Aborsi

Faktor sosial dan budaya masyarakat yang mengarah pada prostitusi membawa dampak pada tindakan aborsi. Secara statistik jelas sekali tidak ada

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>51</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 3* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 157.

<sup>52</sup> MGS. 1 Juli 1892 No. 1614; Cl. 23 Mei 1892 No. 569 Geheim; Javasche Courant 1874 No. 25. Peraturan mengenai pemberantasan prostitusi, sesuai dengan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Januari 1874 No.14, dalam *Pemberantasan Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial* (Jakarta: ANRI, 2001), hlm. 4-13.

pelaporan yang sistematis mengenai ini, karena aborsi adalah kecendrungan dilakukan tertutup dengan tujuan dan berbagai alasan.

Sebagian besar dalam prakteknya aborsi sangat terkait dengan dunia pelacuran dan wanita penghibur serta pergundikan. Mereka merupakan kelompok terbesar yang pernah melakukan tindakan aborsi, hanya dalam beberapa laporan kolonial tidak terbuka dengan jelas jumlah maupun prosentasenya. Fakta tersebut membuat pemerintahan kolonial merasa perlu untuk mengawasi dan menanggulangnya. Hal demikian terlihat di Batavia Jan Pieterszoon Coen memutuskan dan menetapkan pergundikan dan sejenisnya harus diberantas karena berakibat pengguguran kandungan dan pembunuhan bayi.<sup>53</sup> Pernyataan semacam ini adalah bentuk tindakan pelarangan pada perilaku aborsi yang mulai merajalela di tengah masyarakat. Selain itu menjelaskan bahwa praktek aborsi sudah menjadi perhatian pokok pemerintahan, sebab memiliki unsur yang mengarah pada keresahan sosial. Apalagi di perkotaan Jawa lainnya banyak tempat-tempat pelacuran dan pergundikan yang mendorong wanita untuk melakukan pengguguran kandungan.

Tindakan aborsi di Jawa dan secara umum di Indonesia pertama kali dinyatakan tidak legal pada tahun 1918<sup>54</sup> oleh pemerintah Belanda atas dasar kenyataan banyaknya perempuan yang meninggal akibat aborsi yang tidak aman karena dilakukan oleh personil yang tidak trampil.<sup>55</sup> Personil yang tidak trampil adalah masyarakat yang menolong wanita yang akan menggugurkan kandungan melalui cara-cara dan pengobatan tradisional. Mereka adalah dukun beranak atau dukun bayi serta dukun pijat yang berprofesi pada pelayanan kehamilan dan persalinan masa itu.

---

<sup>53</sup> Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh; Pemukiman Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 317.

<sup>54</sup> Lihat *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, tahun 1917, No. 645. Mulai terhitung berlaku tanggal 1 Januari 1918 dengan merujuk pada ayat 1 Koninklijk Besluit 15 Oktober 1915, No. 33.

<sup>55</sup> Muhajir Darwin, "Isu Aborsi; Tinjauan Etika, Kesehatan, Sosial dan Kebijakan," *makalah* pada seminar sehari tentang Aborsi, Seksualitas, dan Kelahiran yang Tidak Dikehendaki, dalam rangka Lustrum VI Keluarga Mahasiswa Antropologi UGM Yogyakarta, 24 Nopember 1994.

Undang-undang yang masih berlaku dapat ditemukan dalam KUHP berasal dari zaman kolonial Belanda yang diadakan pada tahun 1918 tersebut. Undang-undang ini membuat aborsi yang semata-mata bertujuan menggugurkan kandungan menjadi tindak kejahatan. Hanya alasan-alasan medis yang dapat diterima, artinya yang menyangkut situasi darurat tatkala kesehatan atau kehidupan si wanita dalam bahaya, apabila tidak dilakukan aborsi akan mengancam kematian serta penyakit berbahaya lainnya pada rahim. Adanya peraturan ini hanya sejumlah kecil dukun beranak yang mengetahui bahwa aborsi adalah ilegal. Oleh karena itu, aborsi masih terjadi pada masyarakat karena keterbatasan pengetahuan masalah tersebut.

Masalah aborsi sangat terkait dengan seksualitas bebas maupun dunia prostitusi. Hubungan seks dengan kasus aborsi saling mendukung, karena dengan hubungan inilah awal terjadinya pembuahan antara sel-sel kedua manusia yang berlainan jenis. Hubungan ini terjadi baik yang resmi (perkawinan) maupun tidak resmi yang berupa pelacuran maupun pergundikan.

#### E. Kesimpulan

Fenomena seksualitas yang terjadi sebagai dampak dari perubahan itu adanya keterbukaan pemaknaan seks, yang semula orang Jawa secara tradisi memiliki unsur sakral menjadi terbuka dalam hubungan seksnya terutama bagi golongan priyayi atau elite birokrasi. Semula pandangan seks oleh kelompok ini tercermin dari perilaku seks yang sopan dan tertutup pada istri dan selir-selir. Mereka juga memahami simbol-simbol dan bahasa seks yang sempurna tercermin dalam serat *Centhini*. Perkembangan lainnya, perilaku seks menjadi terbuka karena para selir dan penari atau ronggeng istana saling bercerita pengalaman seksnya dengan pembesar istana. Jadilah seks sebagai wacana *vulgar* dilingkungan itu, serta memberikan pelajaran pada yang lainnya.

Bagi pembesar atau pejabat pemerintahan kolonial orang Eropa, mereka mewujudkan bentuk seks bebas dengan memelihara gundik dari wanita pribumi. Pergundikan ini tidak semata kebutuhan seks yang berupa hubungan tuan dan

majikan, selain pelayanan itu termasuk juga membantu aktivitas rumah tangga sehari-hari. Tindakan nyai dan pergundikan ini dengan tegas dan jelas mempengaruhi kepribadian masyarakat Jawa pada masa itu.

Keterbukaan seks semakin menjadi bebas ketika interaksi masyarakat pribumi, China dan orang-orang Eropa yang terjadi pada kehidupan seksual mulai masuk dalam bentuk prostitusi. Hal ini terintegritas dari modernisasi tata kota dan sarana fasilitas yang memadai di pusat pertumbuhan kota itu sendiri. Selain rumah bordil atau tempat tersembunyi, tempat-tempat prostitusi juga terdapat di sekitar stasiun kereta api di perkotaan Jawa dan sekitar pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, pelabuhan Surabaya, pelabuhan Semarang. Dari tempat inilah wacana seksualitas menjadi semakin terbuka tidak jauh beda dengan pasar atau perdagangan barang ekonomis, kemunculan seiring dengan nilai-nilai atau norma hukum dan agama masih cukup lemah untuk mengatasinya.

Sehubungan dengan fakta demikian, maka dari beberapa dampak seksualitas di atas, maka memunculkan tindakan lain atas akibat dari seks bebas. Pada wanita yang berperilaku seks bebas, diantaranya ada yang hamil. Kehamilan yang tidak dikehendaki membuat mereka melakukan tindakan aborsi untuk menutupi rasa malu, alasan ekonomi, seks tanpa perkawinan dan sebagainya. Tindakan aborsi pada masa itu lebih banyak dilakukan oleh dukun, sehingga pada tahun 1918 pemerintah kolonial menganggap aborsi tidak legal karena dilakukan oleh tenaga yang tidak trampil. Hanya sebagian kecil saja yang melakukan tindakan aborsi dengan pertolongan medis. Bagi pihak tenaga kesehatan kebanyakan mengakui apabila mereka melakukan aborsi karena alasan medis bagi wanita dan kehamilannya. Padahal kenyataannya secara tersembunyi ada yang melakukan demikian karena permintaan pasien dengan imbalan uang banyak.

Kesimpulan akhir dari perilaku seks di Jawa awal abad ke-20 yang semula adalah bersifat *privacy* menembus tataran ruang *vulgar* adalah; *pertama*, kedatangan orang Eropa dan cepatnya modernisasi, industrialisasi, dan perkebunan besar membawa pengaruh dan pola berpikir yang semakin terbuka

bagi pribumi dalam hal gaya hidup, perilaku seks dan tindakan yang melanggar norma. *Kedua*, tingkat kesejahteraan masyarakat pribumi pada masa itu masih rendah, sehingga ketika mengenal sistem monetisasi mereka tidak memiliki perhitungan ekonomis untuk membelanjakan uangnya. Terutama bagi buruh dan tenaga kerja di perkebunan besar, dengan uang mereka bebas menentukan pilihan, bahkan bagi yang bujang atau jauh dari istri dapat membeli wanita penghibur. Tenaga kerja wanita juga tidak mampu mandiri secara ekonomi dan sistem penggajian mereka berbeda dengan kaum lelaki, oleh karena itu sebagian dari mereka menjadi wanita penghibur. *Ketiga*, hadirnya seni pertunjukkan seperti penari tayub, ledhek, ronggeng dan lainnya juga memberikan peluang adanya perilaku seksualitas bebas. Di antara mereka bahkan ada yang menjadi selir istana atau melayani seks bagi penonton yang tertarik padanya dengan menerima uang bayaran. Transaksi dilakukan setelah pertunjukkan selesai, tempat dan waktu ditentukan tergantung kesepakatan. *Keempat*, pejabat rendahan dan tentara yang berasal Eropa ada yang bujang atau tidak membawa istri dengan bebas melakukan kegiatan seks ke tempat pelacuran. Bagi yang takut terkena penyakit kelamin lebih suka memelihara gundik, daripada pergi ke tempat pelacuran. *Kelima*, wanita yang mengalami kehamilan dengan mudah dapat melakukan aborsi karena tidak menghendaki bayi tersebut lahir akibat seks bebas, pergundikan, dan pelacuran melalui jasa dukun beranak secara tradisional.

#### F. Daftar Pustaka

- Abeyasekere, Susan, *Jakarta A History*, Singapore: Oxford University Press, 1987.
- Blusse, Leonard, *Persekutuan Aneh; Pemukiman Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Boomgaard, Peter, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic development in Java, 1795-1880*, Amsterdam: Free University Press, 1989.
- Branconier, A. De., "Het Prostitutie-vraagstuk in Nederlandsch-Indie" dalam *De Indische Gids*, 1933.
- Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.

- Djoko Suryo, dkk, *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985.
- Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan; Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hariwijaya, *Seks Jawa Klasik*, Yogyakarta: Niagara, 2004.
- Hull, Terence H dkk., *Pelacuran di Indonesia; Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan The Ford Foundation, 1997.
- Iklan dalam surat kabar *Harian Umum*, tanggal 16 Djuli 1951.
- Iklan dalam surat kabar *Pemberita Betawi*, tanggal 11 Agustus 1902.
- Iklan dalam surat kabar *Tjahaja-Timoer*, tanggal 12 October 1914.
- Iklan dalam surat kabar *Tjahaja-Timoer*, tanggal 28 December 1914.
- Iklan dalam surat kabar *Tjahaja-Timoer*, tanggal 3 Juni 1914.
- Iklan surat kabar *Pemberita Betawi*, tanggal 25 Agustus 1902.
- Iklan surat kabar *Tjahaja-Timoer*, tanggal 29 Juli 1914.
- Ingleson, John. "Prostitution in Colonial Java", ed. David P. Chandler dan M.C. Ricklefs, *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia, Essays in Honour of Professor J.D. Legge*, Victoria: Centre of Southeast Studies Monash University, 1986.
- Jones, dkk., Gavin W. Research School of Social Sciences No. 52, *Prostitution in Indonesia*, Canberra: The Australian National University, 1995.
- Lindblad, J. Thomas. "Tema-tema Kunci dalam Sejarah Ekonomi Modern Indonesia" dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: LP3ES, 2000.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, jilid 3*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Nusa Jawa: Silang Budaya: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Marsono, dkk., *Centhini Tambangraras-Amongraga Jilid V*, Disadur dalam bahasa Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Muhajir Darwin, "Isu Aborsi; Tinjauan Etika, Kesehatan, Sosial dan Kebijakan," *makalah* pada seminar sehari tentang Aborsi, Seksulitas, dan Kelahiran yang Tidak Dikehendaki, dalam rangka Lustrum VI Keluarga Mahasiswa Antropologi UGM Yogyakarta, 24 Nopember 1994.
- Ninuk Kleden-Probonegoro, "Seks Dalam Seni Pertunjukkan Tradisional" dalam *Majalah Prisma* No.7 Tahun XX, Juli 1991.



- Otto Sukatno Cr, *Seks Para Pangeran; Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Jawa*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Owen, Norman G (ed.), *Death and Disease in Southeast Asia*, New York; Oxford University Press Singapore, 1987.
- Raffles, Thomas Stamford. *The History of Java*, Vol I, London: Black, Parbury and Allen, 1817.
- Sartono Kartodirdjo, dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Seri Penerbitan Naskah Sumber, *Pemberantasan Prostitusi di Indonesia Masa Kolonial*, Jakarta: ANRI, 2001.
- Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa*, Jogjakarta: Karya, 1968.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, tahun 1917, No. 645.
- Verdoorn, J.A. *Verloskundige Hulp Voor de Inheemsche Bevolking van Nederlandsch-Indie: Een Social-Mediste Studie*, Boekencentrum N.V. S-Gravenhage, 1941.
- Zwaan, J. P. Kleiweg De. *Abortus Provocatus in Den Indeschen Archipel*, dalam *Voor Ned-Indie en Het Buitenland Afzonderlijke Numbers*, Jargaang Nummer 02.